

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI MENGUNAKAN *VALUE FOR MONEY*

Anita¹⁾, Nirwana²⁾, Darmawati³⁾

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

Correspondence author: Anita, imanitaad13@gmail.com, Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the performance of the Sinjai Regency Regional Government using the Value for Money approach, which consists of three main elements: economy, efficiency, and effectiveness. The research method used is descriptive quantitative, with data samples originating from the APBD Report and the realization of the Sinjai Regency Government budget for 2021-2023. The research results show that the performance of the Sinjai Regency Government from an economic perspective is classified as economical, with actual spending lower than the planned budget. However, from an efficiency perspective, the performance in 2021 and 2023 is considered inefficient because expenditure exceeds income. Meanwhile, in 2022, the government will succeed in achieving efficiency with expenditures lower than revenues. In terms of effectiveness, the government did not succeed in achieving the planned revenue targets in all the years analyzed, so it was considered ineffective. It is hoped that this research can improve public financial management's performance in the Sinjai Regency Regional Government through a more optimal application of the Value for Money principle.

Keywords: performance, sinjai government, value for money, apbd report

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menggunakan pendekatan *Value for Money*, yang terdiri dari tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan sampel data yang berasal dari Laporan APBD dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai dari segi ekonomi tergolong ekonomis, dengan realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran yang direncanakan. Namun, dari segi efisiensi, kinerja tahun 2021 dan 2023 dianggap tidak efisien karena pengeluaran melampaui pendapatan. Sementara itu, pada tahun 2022, pemerintah berhasil mencapai efisiensi dengan pengeluaran yang lebih rendah dari pendapatan. Dari segi efektivitas, pemerintah tidak berhasil mencapai target pendapatan yang telah direncanakan pada semua tahun yang dianalisis, sehingga dianggap tidak efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui penerapan prinsip Value for Money yang lebih optimal.

Kata Kunci : kinerja, pemda sinjai, *value for money*, laporan apbd

A. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi di sektor publik Indonesia telah mengalami kemajuan pesat sejalan dengan penerapan otonomi daerah oleh pemerintah (Heningtyas & Hasibuan, 2021). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah otonom didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan aspirasi mereka dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukhoya, 2023). Implementasi otonomi daerah ini berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yang merupakan salah satu daerah otonom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 membahas tentang daerah otonom, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan guna meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan dan aset untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simbolon et al., 2023). Dalam hal ini pemerintah daerah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aspek keuangan serta aset. Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor publik adalah pendekatan *Value for Money*, yang meliputi tiga komponen utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Konsep *Value for Money* diterapkan diorganisasi sektor publik untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik

dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat (Jadid et al., 2023).

Di lapangan, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sinjai, sering menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai keuangan daerah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset, yang menunjukkan bahwa prinsip *Value for Money* belum sepenuhnya diterapkan di beberapa daerah (Bachtiar, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Sinjai telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya, beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi berdasarkan prinsip *Value for Money*. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya penyerapan anggaran, program yang tidak mencapai target, dan inefisiensi dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kinerja yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan *Value for Money*.

Kinerja mencerminkan sejauh mana kegiatan, program dan strategi tertentu telah mencapai tujuan, visi dan misi organisasi yang direncanakan dalam perencanaan strategis (Cunha et al., 2023). Kinerja keuangan dapat diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu, umumnya satu tahun. APBD memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Romadhan et al., 2024).

Salah satu temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Sinjai memiliki aset tanah milik pemerintah

yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak aset tanah yang tidak dikelola dengan baik, padahal aset tanah tersebut berpotensi digunakan untuk proyek pembangunan atau program lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan aset ini dapat dianalisis dari sudut pandang ekonomi dan efektivitas dalam kerangka *Value for Money*.

Banyak pemerintah daerah, baik pada tingkat dinas maupun pusat, masih menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah penelitian yang membahas kualitas kinerja pemerintah (Aulia & Fuadi, 2022; Cunha et al., 2023; Jadid et al., 2023; Lestari et al., 2024; Maharani & Sari, 2021; Meitri & Susanti, 2022; Nurafifah et al., 2022; Sampow & Pangkey, 2022; Seran, 2021; Solong et al., 2022). Melalui pengukuran kinerja, pemerintah diharapkan mencapai standar kinerja yang baik. Agar bisa mencapai hasil yang memuaskan, pemerintah perlu memenuhi target dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika pengukuran kinerja dilakukan, hasil dari pelaksanaan program kerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Penilaian ini penting untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi target atau perlu peningkatan. Penggunaan prinsip *Value for Money*, yang mengutamakan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas merupakan salah satu metode penilaian kinerja yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Value for Money merupakan prinsip pengendalian dalam sektor public yang didasarkan pada efisiensi, ekonomi dan efektivitas (Majid, 2019). Dalam konteks otonomi daerah, prinsip ini diterapkan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah evaluasi kinerja berbasis *Value for Money* menjadi sangat penting. Salah satu aspek utama yang harus dijaga oleh pemerintah daerah serta unit-unit layanan terkait adalah menjaga keuangan daerah yang sehat. Menurut (Majid, 2019) suatu organisasi dapat dikatakan mencapai *Value for Money* jika mampu mencapai tujuan organisasi.

Penggunaan prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas serta kinerja sektor publik. Manfaat penerapan *Value for Money* meliputi peningkatan efektivitas pelayanan publik dengan memastikan layanan yang diberikan tepat sasaran serta alokasi anggaran yang berfokus pada kepentingan masyarakat.

Penelitian sebelumnya mendukung pentingnya pendekatan *Value for Money* dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan publik. Menurut penelitian (Seran, 2021), penerapan *Value for Money* mampu mengidentifikasi inefisiensi pengeluaran dan meningkatkan akuntabilitas anggaran. Penelitian oleh (Cunha et al., 2023) dan (Lestari et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berbasis *Value for Money* memiliki dampak positif terhadap pelayanan publik dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian terdahulu terkait pengukuran kinerja dengan prinsip *Value for Money* dilakukan oleh (Sampow & Pangkey, 2022) yang secara jelas menunjukkan bahwa ketika menilai kinerja dari segi efisiensi, ekonomi dan efektivitas dengan pendekatan *Value for Money* dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, hasilnya tidak selalu memuaskan. Hal ini berkaitan erat dengan teori *stewardship* yang menekankan bahwa manajemen seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan pribadi tetapi lebih difokuskan pada tujuan utama organisasi. Dalam sektor publik, teori ini menyoroti pentingnya komitmen manajemen untuk bertindak sebagai “*steward*” atau pengelola yang bertanggungjawab terhadap pengguna sumber daya publik secara efisiensi dan efektif (Baihaqi et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Pendekatan *Value for Money*. Penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja pemerintah daerah selama periode 2021 hingga 2023. Pendekatan *Value for Money* yang melibatkan tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas digunakan sebagai

alat analisis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman mengenai kinerja pemerintahan serta penerapan konsep *Value for Money*.

B. METODE PENELITIAN

Metode didefinisikan sebagai suatu cara kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Sampow & Pangkey, 2022). Metode penelitian, di sisi lain, merujuk pada prosedur kerja dalam proses penelitian, baik untuk pengumpulan data maupun untuk pengungkapan fenomena yang diteliti (Zulkarnaen & Fitriani, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Peneliti ini memilih Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagai objek studi, dengan fokus pada analisis kinerja pemerintah menggunakan analisis *Value for Money*, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas anggaran. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), diperoleh dari *official website* Pemerintah Kabupaten Sinjai

(<https://www.sinjaikab.go.id/v4/>) untuk periode 2021-2023.

Analisis data yang digunakan melibatkan analisis non-parametrik dengan penggunaan skala rasio dalam teknik pengolahan data. Skala rasio merupakan jenis skala data dengan tingkat kualitas tertinggi, mengandung semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan interval, serta memiliki kelebihan berupa adanya nilai nol absolut (Seran, 2021). Nol absolut ini berarti nilai dasar yang tetap tidak berubah meskipun menggunakan skala lain. Oleh karena itu, pada skala rasio, pengukuran sudah mencakup perbandingan atau rasio yang jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Ekonomis

Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sinjai untuk periode 2021-2023, terkait dengan data anggaran belanja, serta data realisasi belanja dari RAPBD Kabupaten Sinjai pada periode yang sama, yang telah dirangkum oleh peneliti untuk menghitung rasio ekonomis.

Tabel 1. Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

Tahun	Belanja		%	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2021	Rp 1.295.662.609.969,00	Rp 1.208.396.096.075,37	93,26	Ekonomis
2022	Rp 1.167.154.692.087,00	Rp 1.091.080.720.467,93	93,48	Ekonomis
2023	Rp 1.218.910.262.786,00	Rp 1.134.673.400.656,78	93,08	Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 1 menunjukkan rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, di mana pada tahun 2021 realisasi belanja mencapai 93,26% dari anggaran yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran aktual sedikit di bawah jumlah yang dianggarkan, sehingga pengguna anggaran dapat dikatakan ekonomis. Pada tahun 2022, rasio realisasi belanja adalah 93,48% dari anggaran, yang menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien dengan selisih minimal

antara rencana dan realisasi. Pada tahun 2023, realisasi belanja sebesar 93,08% dari anggaran kembali menunjukkan bahwa pengeluaran tetap lebih rendah dari anggaran yang direncanakan, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan dana.

Selama tiga tahun berturut-turut, rasio ekonomis berkisar di atas 93%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Sinjai dilakukan secara ekonomis, dengan realisasi belanja selalu

berada sedikit di bawah anggaran yang direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur berdasarkan tingkat ekonomis selama periode 2021 hingga 2023 masuk dalam kategori ekonomis. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sinjai. Konsep ekonomis ini berkaitan dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input tanpa adanya pemborosan dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Teori *Stewardship* mendukung pendekatan ini, di mana manajemen berfokus pada penciptaan tujuan utama organisasi demi kepentingan bersama, bukan sekedar tujuan pribadi (Baihaqi et al.,

2023). Penelitian ini juga sesuai dengan peneliti terdahulu yang menunjukkan tingkat ekonomis suatu pemerintah daerah penelitian yang dilakukan oleh (Seran, 2021) pemerintah daerah yang diteliti telah termasuk pada rasio ekonomis.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Efisiensi

Hasil yang diperoleh dari RAPBD Kabupaten Sinjai atas data realisasi belanja dan realisasi pendapatan tahun 2021-2023 telah disimpulkan peneliti untuk menghitung rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Keterangan
2021	Rp 1.197.525.397.488,60	Rp 1.208.396.096.075,37	100,91	Tidak Efisien
2022	Rp 1.119.284.253.133,03	Rp 1.091.080.720.467,93	97,48	Efisien
2023	Rp 1.131.123.716.019,33	Rp 1.134.673.400.656,78	100,31	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tahun 2021, belanja pemerintah mencapai 100,91% dari pendapatan yang direalisasikan, menunjukkan bahwa pengeluaran melebihi penerimaan dengan selisih 0,91%. Rasio efisiensi di atas 100% ini mencerminkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, karena belanja lebih tinggi dari pada pendapatan. Sebaliknya, tahun 2022 mencatat rasio efisiensi sebesar 97,48%, yang berarti pendapatan lebih besar dari pada belanja, menandakan pengelolaan keuangan yang baik dan efisien. Namun, pada tahun 2023, rasio efisiensi kembali meningkatkan menjadi 100,31%, menunjukkan bahwa pengeluaran sedikit melebihi penerimaan (selisih 0,31%) yang kembali menciptakan kondisi ketidakefisienan.

Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. ini membandingkan antara biaya untuk menghasilkan pendapatan dan pendapatan

yang diperoleh. Kinerja pemerintah daerah dianggap efisien jika rasio efisiensinya di bawah 100%, semakin kecil rasio tersebut, semakin baik kinerja yang ditunjukkan.

Analisis data menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai hanya berhasil mencapai pengelolaan keuangan yang efisien pada tahun 2022, ketika belanja lebih rendah dari pendapatan. Teori *stewardship* berasumsi bahwa pengelola (steward) bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik (principal) dengan mengelola sumber daya secara efisien. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pada tahun 2022, rasio efisiensi menunjukkan pengelolaan yang baik, di mana pendapatan lebih besar dari belanja. Ini mencerminkan perilaku steward yang berorientasi pada kepentingan Bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori *stewardship*.

Pada tahun 2021 dan 2023, meskipun selisih antara pendapatan dan belanja kecil, keduanya tidak efisien karena belanja

melebihi pendapatan lebih dari 100%. Situasi ini dapat dipahami sebagai kegagalan steward dalam menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan bersama. Ketidakmampuan untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan menunjukkan bahwa steward belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawab mereka dalam melindungi dan memaksimalkan aset pemerintah daerah. Ini mengindikasikan perlunya pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan untuk menghindari defisit.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan teori *stewardship* dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai efisiensi. Kinerja yang baik dalam aspek akuntabilitas dan

transparansi menjadi factor kunci agar steward dapat bertindak sesuai dengan kepentingan publik (Baihaqi et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan temuan (Cunha et al., 2023) dan (Lestari et al., 2024) yang mendukung bahwa pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Tingkat Efektivitas

Hasil yang diperoleh dari laporan APBD Kabupaten Sinjai tahun 2021-2023 atas data anggaran pendapatan dan hasil yang diperoleh dari RAPBD Kabupaten Sinjai atas data realisasi anggaran tahun 2021-2023, telah disimpulkan peneliti untuk menghitung rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan		%	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2021	Rp 1.209.533.359.353,00	Rp 1.197.525.397.488,60	99,01	Tidak Efektif
2022	Rp 1.120.966.892.091,00	Rp 1.119.284.253.133,03	99,85	Tidak Efektif
2023	Rp 1.167.349.963.237,00	Rp 1.131.123.716.019,33	96,90	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Untuk hasil perhitungan Harga Pokok Pada tahun 2021, realisasi pendapatan mencapai 99,01% dari anggaran yang direncanakan. Walaupun rasio ini mendekati 100%, realisasi pendapatan masih sedikit di bawah target anggaran. Karena itu, penggunaan anggaran dianggap kurang efektif, mengingat target pendapatan tidak sepenuhnya tercapai, meskipun selisihnya kecil. Di tahun 2022, rasio efektivitas mencapai 99,85%, hampir mencapai 100%. Namun, realisasi pendapatan tetap tidak memenuhi target yang telah direncanakan, sehingga dianggap tetap tidak memenuhi target yang telah direncanakan, sehingga dianggap kurang efektif. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan hanya mencapai 96,90% dari target anggaran yang ditetapkan,

menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh masih di bawah target, sehingga efektivitas kinerja pemerintah dalam mencapai pendapatan dianggap belum efektif.

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun efektivitas tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, melainkan berfokus pada pencapaian yang sesuai dengan tujuan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sinjai belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam melaksanakan kinerjanya, berdasarkan hasil pengukuran rasio efektivitas. Ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh menyatakan bahwa *Value for Money* dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, hasilnya tidak selalu memuaskan.

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai selama tiga tahun berturut-turut memiliki rasio ekonomis berkisar di atas 93%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja Kabupaten Sinjai selama periode 2021 hingga 2023 masuk dalam kategori ekonomis. Sementara untuk efisiensi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai hanya berhasil mencapai pengelolaan keuangan yang efisien pada tahun 2022, ketika belanja lebih rendah dari pendapatan, sementara pada tahun 2021 dan 2023 meskipun selisih antara pendapatan dan belanja kecil, keduanya tidak efisien karena belanja melebihi pendapatan lebih dari 100%. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam melaksanakan kinerjanya berdasarkan hasil pengukuran rasio efektivitas, hal ini terlihat selama periode 2021-2023 target pendapatan yang dianggarkan tidak pernah tercapai 100%.

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran menghasilkan manfaat yang optimal. Teori Stewardship juga relevan karena menekankan tanggung jawab pengelola untuk bertindak sesuai kepentingan publik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, J. R., & Fuadi, R. (2022). Pengaruh Penerapan Value For Money Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Daerah (Studi Pada Kantor BPKD Kabupaten Bireuen). *Jimeka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 478–484.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.20542>

Bachtiar, S. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya). *Syntax Idea*, 2(3), 84–91.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i3.162>

Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency and Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36.
<https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>

Cunha, A. A. Da, Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer : Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86–100.
<https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1195>

Heningtyas, O. S., & Hasibuan, A. B. (2021). The Development of Public Sector Accounting in Indonesia – A Bibliography Study. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 4(6), 832–836.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i6-19>

Jadid, P., Husnan, L. H., & Wardani, L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020. *JRK : Jurnal Riset Keuangan*, 1(1), 56–67.
<https://journal.unram.ac.id/index.php/jrk/article/view/1759>

Lestari, D. A., Aswat, I., & Yantiana, N. (2024). Implementation of the Value for Money Concept in Measuring Financial

- Performance at the Library and Archives Service of West Kalimantan Province. *JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1831–1838. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2831>
- Maharani, Y., & Sari, R. (2021). Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. *IAKP: Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1919>
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa : Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.
- Meitri, I. A., & Susanti, E. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. *Sinergi: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 14–23. <https://sinergi.sinergiinstitute.com/index.php/SJEBM/article/view/2>
- Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Akuntansi: Jurnal Publikasi Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 8–14. <https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>
- Romadhan, S., Siboro, S. F., Putri, S. N. K., & Hia, W. V. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value Money Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022. *AEPPG: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak Perspektif Global*, 1(3), 87–95. <https://doi.org/10.61132/aepg.v1i3.258>
- Sampow, R., & Pangkey, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 261–271. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2755>
- Seran, M. S. B. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1610>
- Simbolon, T. R., Hukom, A., Sutrisno, F. A. I., Lesdiana, A., Fransiska, N., & Priskila, E. (2023). Strategi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemda Kotawaringin Barat. *JPIPS: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(2), 345–353. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i2.11981>
- Solong, N. P., Gobel, Y. P., & Kurniawan, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Satuan Kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode Tahun 2019-2021. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 2(1), 220–235. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v2i1.132>
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : PT Pustaka Barupress.
- Sukhoya, W. (2023). Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), 144–160. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4383>